



KABUPATEN WAY KANAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diperlukan pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana);
b. bahwa untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.1.36/IV.16-WK/HK/2024 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Way Kanan, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan dengan Susunan Personalia dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Sekretaris Daerah sebagai Atasan PPID Utama melalui Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi dan Informasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Pengelola Layanan Dokumentasi dan Informasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki visi misi yaitu:
Visi:

Menyelenggarakan layanan informasi yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan cepat tanggap untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan partisipatif di Kabupaten Way Kanan.

Misi:

1. Menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses.
2. Membuka ruang keterlibatan masyarakat melalui informasi yang transparan.
3. Memberikan layanan yang cepat, tepat, dan ramah.
4. Mengadakan edukasi dan sosialisasi tentang hak informasi.
5. Membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk penguatan informasi.
6. Melakukan evaluasi dan inovasi berkelanjutan dalam pengelolaan informasi.

KELIMA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

a.n Ditetapkan di Blambangan Umpu
 Pada tanggal 10 Desember 2025

BUPATI WAY KANAN
KEPALA BADAN,

ARIYAN, S.Sos., M.M
Penjaga Utama Muda/IV.c
NIP. 19701210 199101 1 001

Tembusan:

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID)
Utama Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
2. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN WAY KANAN

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi	Ket.
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Way Kanan	Atasan PPID Pelaksana	
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Way Kanan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi			
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Way Kanan.	Koordinator	
4.	FIRDAUS, S.E., M.M. Perencana Muda Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
5.	BUDIANTO.Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
6.	DEVI NELI, Operator Layanan Operasional	Anggota	
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi			
7.	Kabid. Poltik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Way Kanan.	Koordinator	

8.	AHSAN PUTRA, S.Sos. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
9.	RUSTAM EFENDI. Pengadministrasian Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
Bidang Pendukung Sekretariat			
10.	Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Way Kanan.	Koordinator	
11.	DYAH AYU ANANDRA, S.Tr.Kom, Pranata Komputer Ahli Pertama.	Anggota	
12.	ERLINDA YUSPINA, S.IP, Analis Kebijakan.	Anggota	
13.	ALIUS SETIAWAN,S.H., Analis Kebijakan.	Anggota	
14.	RINA SAFITRI, Penata Layanan Operasional	Anggota	
15.	RIKA APRINA, S.T. Pranata Komputer Ahli Pertama	Operator PPID Pelaksana	
Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi			
16.	Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Koordinator	
17.	ERWANSYAH, S.H. Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
18.	ASIH RIYANA, Penata Layanan Operasional	Anggota	

a.n Ditetapkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 10 Desember 2025

BUPATI WAY KANAN
KEPALA BADAN,

ARIFIN, S.Sos., M.M.

Perwakilan Utama Muda/IV.c
NIP. 19701210 199101 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

RINCIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN WAY KANAN

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
 - a) Tugas
 - Membina, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - Memberikan persetujuan akhir terhadap keputusan yang diambil oleh PPID Pelaksana terkait layanan informasi publik.
 - Menyelesaikan keberatan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi.
 - Mengkoordinasikan kebijakan keterbukaan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Mengambil langkah strategis dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
 - b) Wewenang.
 - Menetapkan kebijakan, keputusan, dan instruksi terkait penyelenggaraan layanan informasi publik.
 - Memutuskan hasil penyelesaian keberatan informasi.
 - Mengambil tindakan korektif terhadap pelaksanaan tugas PPID Pelaksana.
 - Mewajibkan perangkat bidang untuk menyediakan data dan dokumen.
 - c) Tanggungjawab
 - Bertanggung jawab atas optimalisasi pelayanan informasi publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - Menjamin terselenggaranya layanan informasi sesuai asas transparansi dan akuntabilitas.
 - Menjamin seluruh proses keberatan informasi diputuskan sesuai ketentuan.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
 - a) Tugas
 - Mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - Mengkoordinasikan pengumpulan, pendokumentasian, dan penyajian informasi publik.
 - Menyusun daftar informasi publik (DIP) dan melakukan pemutakhiran secara berkala.

- Menyediakan informasi publik yang wajib diumumkan, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi yang diberikan berdasarkan permohonan.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada seluruh bidang.
- Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan informasi kepada Atasan PPID.

b) Wewenag

- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menentukan klasifikasi informasi: terbuka, dikecualikan, serta jangka waktu pengecualian.
- Meminta setiap bidang/unit kerja untuk menyediakan data dan dokumen yang diperlukan.
- Memberikan tanggapan atas permohonan informasi dan penyelesaian keberatan tingkat PPID Pelaksana.

c) Tanggungjawab

- Bertanggung jawab atas akurasi, ketersediaan, dan keutuhan data/informasi yang disampaikan.
- Menjamin layanan informasi diberikan tepat waktu sesuai SOP.
- Menjamin kerahasiaan informasi yang dikecualikan.

3. Bidang Pendukung Sekretariat.

a) Tugas

- Melakukan administrasi penerimaan dan pencatatan permohonan informasi publik.
- Mengelola surat-menyurat, penjadwalan, agenda rapat PPID Pelaksana.
- Mengarsipkan dokumen layanan informasi publik secara tertib dan mudah diakses.
- Menyiapkan laporan administrasi dan dokumentasi kegiatan PPID.
- Mendukung operasional pelayanan seperti penyediaan formulir, berita acara, dan daftar hadir.

b) Wewenag

- Mengelola sistem administrasi dan dokumentasi PPID Pelaksana.
- Meminta kelengkapan dokumen pendukung dari bidang terkait.
- Mengatur mekanisme pelayanan di meja layanan secara administratif.

c) Tanggungjawab

- Menjamin terselenggaranya administrasi PPID secara tertib dan sistematis.
- menjaga keaslian dan keamanan arsip dokumen layanan informasi publik.
- Menyediakan laporan administrasi secara berkala.

4. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.

a) Tugas

- Mengumpulkan data dan dokumen dari seluruh bidang/unit kerja.
- Melakukan verifikasi dan validasi data sebelum ditetapkan menjadi informasi publik.
- Melakukan klasifikasi informasi (terbuka/dikecualikan) berdasarkan regulasi.
- Melakukan uji konsekuensi untuk penetapan informasi yang dikecualikan.
- Mengelola pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP).
- Menyampaikan informasi hasil klasifikasi kepada

Bidang Pelayanan untuk dipublikasikan.

b) Wewenag

- Memeriksa dan meminta klarifikasi kepada bidang/unit terkait terhadap data yang masuk.
- Menentukan kelengkapan dan kelayakan data untuk dipublikasikan.
- Melakukan penandaan informasi dengan kategori tertentu (rahasia, internal, publik).

c) Tanggungjawab

- Bertanggung jawab memastikan semua informasi yang dibuka sudah melalui proses verifikasi.
- Menjamin ketepatan klasifikasi informasi sesuai aturan.
- Menjaga kerahasiaan dokumen yang dikecualikan.

5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

a) Tugas

- Memberikan pelayanan langsung, tidak langsung, dan online kepada pemohon informasi.
- Menyampaikan informasi publik yang sudah disetujui dan diklasifikasikan oleh PPID Pelaksana.
- Mengelola publikasi informasi melalui website, media sosial, papan pengumuman, dan kanal lainnya.
- Menangani dan merespons permohonan informasi sesuai batas waktu layanan.
- Menyusun laporan layanan informasi publik bulanan/semester/tahunan.
- Meningkatkan kualitas sarana layanan seperti meja informasi, formulir, dan sistem online.
- Menangani keberatan yang diajukan pemohon informasi tingkat PPID Pelaksana.
- Menyiapkan bahan dan dokumen pendukung dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.
- Melakukan koordinasi dengan bidang/unit terkait yang memiliki informasi dimohon.
- Melakukan analisis terhadap permohonan informasi yang berpotensi menimbulkan sengketa.
- Menyiapkan laporan penyelesaian sengketa kepada Atasan PPID.
- Melakukan pendampingan proses mediasi, ajudikasi nonlitigasi, hingga keputusan Komisi Informasi.

b) Wewenag

- Mengakses DIP dan seluruh dokumen yang telah ditetapkan sebagai informasi publik.
- Memberikan atau menolak pemberian informasi sesuai hasil klasifikasi.
- Mengelola kanal publikasi resmi Dinas Kominfo dan PPID.
- Meminta dokumen dan klarifikasi dari seluruh bidang/unit untuk penyelesaian sengketa.
- Mengeluarkan rekomendasi internal terkait langkah penyelesaian sengketa.
- Mengambil tindakan preventif untuk mengurangi potensi sengketa informasi

c) Tanggung Jawab

- Menjamin pelayanan informasi berlangsung cepat, tepat, ramah, dan transparan.
- Menjamin pemohon mendapat jawaban resmi sesuai prosedur.
- Menghindari keterlambatan layanan yang melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.

- Menjamin proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai peraturan.
- Menjaga keakuratan dokumen yang digunakan dalam proses sengketa.
- Menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan selama proses sengketa.

6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

a) Tugas

- Menyiapkan bahan dan dokumen terkait keberatan dan sengketa informasi publik.
- Mengkoordinasikan penanganan keberatan atas permohonan informasi publik.
- Menyiapkan tanggapan, klarifikasi, dan/atau jawaban PPID Pelaksana dalam proses sengketa informasi publik.
- Mendukung PPID Atasan dalam proses mediasi atau ajudikasi di Komisi Informasi.
- Melakukan evaluasi terhadap sengketa informasi publik sebagai bahan perbaikan layanan.

b) Wewenag.

- Menghimpun data, dokumen, dan keterangan dari bidang/unit kerja terkait.
- Mengakses arsip permohonan informasi dan dokumen pendukung sengketa.
- Memberikan masukan dan rekomendasi kepada PPID Pelaksana dan PPID Atasan.
- Berkoordinasi dengan perangkat daerah, bagian hukum, dan pihak terkait sesuai kebutuhan penanganan sengketa.

c) Tanggungjawab

- Kesiapan dan keakuratan dokumen dalam proses keberatan dan sengketa informasi publik.
- Ketepatan waktu penanganan keberatan dan dukungan penyelesaian sengketa.
- Kepatuhan proses penyelesaian sengketa terhadap peraturan perundang-undangan.
- Penyusunan laporan dan rekomendasi hasil penanganan sengketa informasi publik.

7. Operator PPID Pelaksana.

a) Tugas Operator PPID Pelaksana

- Melakukan input, pembaruan, dan pengelolaan data/informasi pada Sistem Informasi PPID (website, aplikasi, DIP online).
- Mengelola registrasi permohonan informasi mulai dari pencatatan, verifikasi, hingga penyerahan kepada Bidang Pelayanan.
- Mengarsipkan dokumen layanan informasi publik secara digital maupun fisik.
- Mengunggah informasi publik yang telah ditetapkan PPID Pelaksana sebagai informasi yang wajib diumumkan.
- Membantu penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP).
- Melakukan pengelolaan data statistik layanan informasi (jumlah pemohon, jenis permintaan, waktu layanan, hasil layanan).
- Membantu proses uji konsekuensi dengan menyiapkan dokumen pendukung yang diminta bidang terkait.

- Menyiapkan draft jawaban permohonan informasi untuk ditindaklanjuti oleh Bidang Pelayanan dan PPID Pelaksana.
 - Memastikan seluruh permohonan tercatat dalam buku register, aplikasi, atau sistem online tanpa keterlambatan.
 - Mengelola penyimpanan dokumen informasi publik secara terstruktur, aman, dan mudah ditemukan.
 - Mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik internal.
 - Membantu persiapan laporan Layanan Informasi Publik bulanan/semester/tahunan.
- b) Wewenang Operator PPID Pelaksana
- Mengakses seluruh sistem aplikasi PPID untuk keperluan penginputan dan pemutakhiran data.
 - Meminta data atau dokumen kepada perangkat bidang/unit kerja atas instruksi PPID Pelaksana.
 - Melakukan pengelompokan awal atas permohonan informasi berdasarkan jenis permintaan dan tingkat urgensinya.
 - Menolak permohonan informasi yang tidak memenuhi syarat administrasi (misal: formulir tidak lengkap), untuk kemudian dimintakan perbaikan kepada pemohon.
 - Mengusulkan perbaikan teknis layanan, perbaikan sistem, dan pembaruan konten kepada PPID Pelaksana.
 - Mengelola akun operator (username/password) sesuai keamanan sistem yang berlaku.
- c) Tanggung Jawab Operator PPID Pelaksana
- Bertanggung jawab atas ketepatan data yang dimasukkan dan kebenaran informasi yang dipublikasikan melalui sistem PPID.
 - Menjaga keamanan data, termasuk informasi yang dikecualikan, sesuai ketentuan kerahasiaan.
 - Menjamin semua permohonan informasi diproses dengan cepat, tepat, dan sesuai SOP yang berlaku.
 - Menjamin semua update di website PPID/Kominfo dilakukan secara berkala dan valid.
 - Menjaga kerapian arsip digital dan fisik agar mudah diakses pada saat pemeriksaan atau sengketa informasi.
 - Menjamin keteraturan dan akurasi laporan data statistik layanan informasi.
 - Menjaga kelancaran operasional sistem PPID, termasuk mengatasi masalah teknis ringan sebelum eskalasi.
 - Menjaga integritas dan profesionalitas dalam setiap proses layanan informasi publik.

a.n Ditetapkan di Blambangan
Umpu Pada tanggal 10
Desember 2025 BUPATI WAY

KANAN

KEPALA BADAN,



ARIFIN, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19701210 199101 1 001